



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M NOVI CAHYO PRABOWO
2. Jabatan : AUDITOR MUDA
3. NHK : 425301

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 565.174.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/81 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 330.174.000
2. Tanah Seluas 116 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA NF100D Tahun 2003, WARISAN Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.002

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 190.136.661

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 782.310.663

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 632.310.663

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.